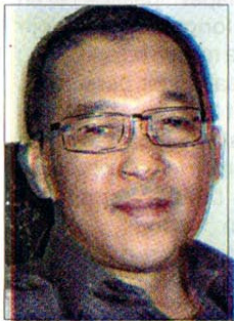


Kasus Tipikor Baju Hansip Gate Dukungan Kejati Menguat



” Masalah ini Jangan Dicampur Adukan Dengan Ranah Politis, Ibarat Tukang Membuat Suatu Bangunan Dimana Mereka Memang Benar Ahlinya ”

RETNO PRAMUDYA
Ketua Komisi A DPRD Provisi Kalbar

Pontianak, Swara Keadilan

Tindakan tegas Kajati Kalbar dalam menangani kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di Kalbar patut diacungkan jempol, walaupun masih

jauh dari harapan, tapi setidaknya Kejati sudah menampakan taringnya. Buktinya para tersangka koruptor baik dari kalangan pejabat pemerintah, maupun dari kalangan pengusaha

” Lembaga Nasional KPPKD Siap Menjadi Bumper Kejaksanaan Dalam Rangka Low Enforcement Dikalbar ”

HARRY PASOLIMA
Wakil Ketua KPPKD Pontianak

(kontraktor) akhirnya merasakan dinginnya teralis besi di Hotel Prodeo (Rutan) kelas II A Pontianak. Seperti kasus dugaan tipikor pengadaan baju hansip di Kesbangpelinmas Provinsi



Kalbar, dimana dari hasil audit BPK RI Perwakilan Kalbar menyimpulkan sebagian dana pengadaan baju Hansip itu diduga dikorupsi. Kemudian kasus tersebut ditindak lanjuti oleh Kejati



dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejati ternyata telah terjadi indikasi mark-up dalam pengadaan baju hansip sebanyak 15.950 stel pakaian yang dilakukan dua tahap, yakni tahun 2008

BACA LANJUTAN HAL 10

dan 2009 dengan pagu dana sekitar Rp.9,3 miliar sehingga negara dirugikan Rp.4,6 miliar, dimana para tersangka sudah menginap dihotel prodeo Pontianak.

Langkah tegas Kejati itu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak lapisan masyarakat, terutama dari Lembaga Nasional Komite Pemantau Pemilihan dan Kinerja Kepala Daerah (KPPKD) Pontianak yang sangat memberikan apresiasi dan dukungan terhadap kinerja kejati dalam membongkar kasus korupsi pengadaan pakaian hansip yang menjadi perhatian serta sorotan seluruh elemen masyarakat di wilayah Kalbar bahkan nasional.

Dari ketiga Pejabat yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejati Kalbar yakni, Cornelius Kimha, Tony Ferdy, dan Donald Ginanjar, dua orang tersangka yaitu Tony Ferdy dan Donald Ginanjar, sudah mendekam di Teralis besi Rutan Kelas II Pontianak, sedangkan tersangka Cornelius Kimha dijadikan tahanan kota dengan alasan sakit, ujar wakil ketua KPPKD Harry Pasolima, Amd kantornya yang didampingi Taufik Hidayat selaku tim investigasi Lembaga Nasional KPPKD, Sabtu (6/11).

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum Humas) Kejati Kalbar Arifin Arsyad, SH saat dimintai keterangan mengatakan bahwa permohonan penangguhan penahanan para tersangka sampai saat ini belum ada perubahan statusnya dan masih menjadi tahanan rutan. Tapi untuk CK memang tidak ditahan dirutan lantaran sakit, dan ada rekam medik yang diberikan pengacaranya kepada kita, namun sayangnya Arifin tidak bisa merinci penyakit yang diderita oleh Kadis Kehutanan Prov. Kalbar itu. Hanya Kasi Penkum Kejati itu mengatakan status CK adalah tahanan kota yang sudah dilakukan mulai minggu terakhir oktober 2010 atau sebelum TF ditahan, karena sewaktu CK memenuhi panggilan, belum lama dilakukan pemeriksaan, dia mengeluh sakit makanya kita tidak menahan CK. Dan Arifin juga mengatakan, sakitnya CK dari pihak kita (Kejati Kalbar, red) untuk saat ini belum memerlukan dokter khusus, karena dia (CK) masih memenuhi panggilan, kata Kasi Penkum ini diruangannya, Jum'at (5/11).

Harry dari KPPKD Pontianak menambahkan Kejati sudah menunjukkan kinerjanya yang sebelumnya menjadi buah bibir dikalangan masyarakat bahwa penegakan hukum terkesan diskriminatif atau tebang pilih, kini sudah dibuktikan siapapun yang melakukan tindak pidana kedudukan sama dimata hukum tidak ada perubahan status. Apakah mereka itu pejabat, ataupun orang yang berpengaruh, proses hukum tetap berjalan sesuai dengan amanah Undang-undang yang berlaku. Langkah tegas kejati yang profesional dan proporsional tanpa tebang pilih harus kita dukung agar hukum di Kalbar dapat berjalan dan ditegakan sebagaimana mestinya, karna hal ini sangat diharapkan oleh masyarakat, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, dan ini harus ditanamkan kepada pelaksana hukum.

Dalam alam demokrasi yang lagi tumbuh dan berkembang di NKRI, Lembaga Nasional KPPKD juga mendukung orasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat, ormas (lembaga), dan mahasiswa, terkait penegakan hukum, asalkan mengacu pada aturan yang ada dan tidak ditunggangi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab yang hanya untuk mencari kepentingan pribadi maupun golongan. Selain itu KPPKD juga menghimbau kepada Kejati agar semua kasus tipikor lama ataupun baru yang belum dituntaskan, baik di Kejari maupun di Kejati Kalbar, yang melibatkan pejabat daerah seperti Walikota, Bupati, dan Gubernur yang masih aktif maupun tidak aktif, agar segera dituntaskan atau dimeja hijaukan agar tidak menciderai rasa keadilan masyarakat, pintanya.

Hal senada juga dikatakan Ketua Harian Forum Komunikasi Masyarakat Pantai Utara (FKMPU) Prov. Kalbar yang juga selaku Ketua KPPKD Kota Pontianak Yayat Darmawi, SE kepada Swara Keadilan, mensupport secara formal maupun non formal kepada Kejati Kalbar dalam memberantas tipikor tanpa ada yang dipeti eskan, dan kami support Kejati untuk membersihkan oknum diajarannya termasuk jaksa nakal yang menjadi trigernya koruptor, dan kami juga siap menjadi bumper Kejaksaan dalam rangka low enforcement di Kalbar, tegas Yayat.

Berangkat dari kasus pengadaan pakaian hansip yang sekarang sudah masuk ke ranah

hukum yang ditangani oleh Kejati Kalbar, membuat kami dari FKMPU mendorong secara maksimal persoalan tersangka kasus baju hansip agar tidak mengaitkan pihak-pihak tertentu karena persoalan baju hansip adalah ranah hukum. Jadi yang digunakan adalah hukum positif untuk menyelesaikan persoalan tersebut. dengan demikian FKMPU mengharapkan dan mengajak sesama elemen masyarakat untuk dapat berbicara sesuai dengan koridor fungsi dari pada lembaga kesucian itu sendiri.

FKMPU Provinsi Kalbar lebih melihat sengketa baju hansip gate adalah, persoalan pelanggaran hukum murni dan bukan pelanggaran hukum adat, sehingga kita mengharapkan persoalan baju hansip lebih diselesaikan dengan proporsional hukum.

Dan satu harapan yang lebih mendasar dari pada FKMPU adalah bagaimana Kejati menangani persoalan baju hansip gate, lebih mengarah pada sistem dan azas kualitatif dan kuantitatif, artinya penanganan tersebut harus dimulai dari tersangka kelas atas atau top down, bukan dinilai tersangka kelas bawah botom up, agar jangan sampai menimbulkan sutvrcil hukum, intinya sangat setuju apabila supremasi hukum lebih mengarah kepada penegakan hukum yang substantif dengan menggunakan metode-metode yang riil dan nyata dalam menentukan status tersangka.

Dijelaskan kembali oleh FKMPU Provinsi Kalbar terkait keseriusan Gubernur Drs. Cornelis MH untuk menanggukhan penahanan terhadap Tony Ferdy, itu hak Gubernur tetapi kalau menurut pendapat kami tentulah tidak sinkron dan tidak etis apabila Gubernur sudah terlalu jauh masuk kerana kewenangan hukum. Pasalnya, kewenangan Gubernur terbatas dibidang pemerintahan saja, dan dibidang hukum menurut konstitusi sudah diatur termasuk salah satunya Kejaksaan lah yang berwenang penuh untuk melakukan proses hukum. Jadi sangat-sangat aneh kalau Gubernur mengintervensi aparat penegak hukum di Kalbar ini ?.

Padahal sudah diatur dalam undang-undang. Artinya aturan hukum harus merujuk pada hukum atau Undang-undang yang lebih tinggi demikian hirarki hukum menurut aturan normative dan substantive. Jadi bukan perda yang melemahkan

Undang-undang bisa diuji materi ke MA tu ?ujarnya. Ditegaskan kembali oleh Yayat, kami sangat Apresiasi atau mendukung penuh Kejati Kalbar dalam mengusut koruptor di Kalbar. Dan kalau ada rumor yang akan "memindahkan" Kajati Kalbar, Faedhoni Yusuf, SH, MH karena alasan yang tidak urgen dalam konotasi hanya mengakomodir interest para koruptor kami tidak setuju serta membantah atas dan demi hukum.

Lembaga Nasional KPPKD dan FKMPU "tantang" akan melanjutkan intimidasi dan pelecehan terhadap penegakan supremasi hukum secara realibilitas. Apalagi selama ini kata Yayat, kasus-kasus korupsi sering terdengar lantang dengan menyebutkan aktor-aktor yang sudah menjadi terdakwa, tetapi anomalnya disaat kasus-kasus tipikor tersebut memasuki masa penyelesaian akhir yang sudah menjadi angka pasti di inkrah (diputuskan hukumnya) hingga saat ini tidak terdengar lagi...?, gerah Ketua KPPKD Kota Pontianak ini yang sekarang sedang melanjutkan study S2 hukumnya di Malang.

Sementata Ketua Komisi ADPRD Provisi Kalbar H. Retno Pramudya, SH minta kepada Kejati Kalbar dalam menyikapi kasus baju hansip harus mengacu pada KUHP dan KUHP. Saya dari Komisi ADPRD Prov. Kalbar mengajak semua pihak untuk mensikapi penanganan baju hansip yang ditangani Kejati ini agar lebih jernih dan sesuai koridor hukum yang berlaku. Dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kejati Kalbar dalam penanganan proses hukum baju hansip ini. Karena mereka sebagai lembaga, sebagai penegak hukum mereka sangat memahami dan mengerti benar dalam menangani pakaian hansip. Kita harus yakin mereka (Kejati Kalbar, red) tidak akan keluar dari bingkai hukum yang berlaku, sambil kita mengawasi kinerja mereka bila mana ada hal penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya barulah kita melakukan kritikan-kritikan yang sifatnya konstruktif.

Dan kita minta semua pihak untuk menahan diri dalam menyikapi kasus baju hansip ini dan jangan sampai mencampur adukan dengan ranah politis. Ibarat tukang membuat suatu bangunan, dimana mereka memang benar ahlinya. Ucapan Retno diruangannya Rabu, (10/11). (Lay)